
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako dalam Kerangka Mitigasi Dampak Covid-19

Respons Pemerintah terhadap Dampak Pandemi

Anggaran penanganan pandemi Covid 19: Rp 695,2 T

Alokasi tertinggi untuk Program Perlindungan Sosial Rp 203,9 T (29,3%)

Alokasi tertinggi untuk

- Program Sembako Rp43,6 T (21,4%)
- PKH Rp37,4 T (18,3%)



Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum

Editor: Bayu Galih

di Presiden M'vul Amin mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp.

Penyesuaian terhadap PKH dan Program Sembako



Direncanakan selama April – Desember 2020

Tentang Penelitian SMERU

Metode kualitatif



5 Kabupaten/kota:
2 kecamatan 2 desa/kelurahan



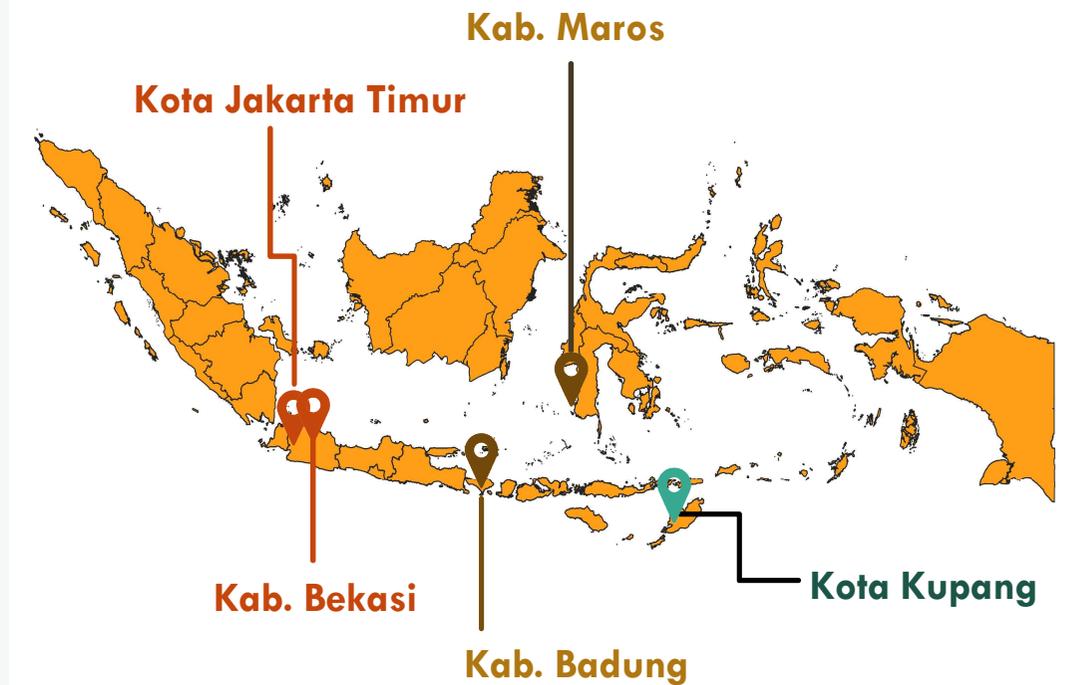
Pengumpulan data:
akhir April – pertengahan Mei 2020



Wawancara via telepon



Informan tingkat kabupaten/kota
hingga masyarakat



PKH dan Program Sembako Menjadi Jaring Pengaman bagi KPM



Bantuan PKH memberi jaminan penerimaan uang tunai



Program Sembako mengurangi pengeluaran pangan pokok hingga 2 minggu/bulan dan memungkinkan variasi konsumsi dan kecukupan gizi



Kontribusi terhadap pengeluaran makanan kelompok 20% termiskin adalah: 25% pada PKH dan 10% pada Program Sembako (Susenas 2019, diolah)

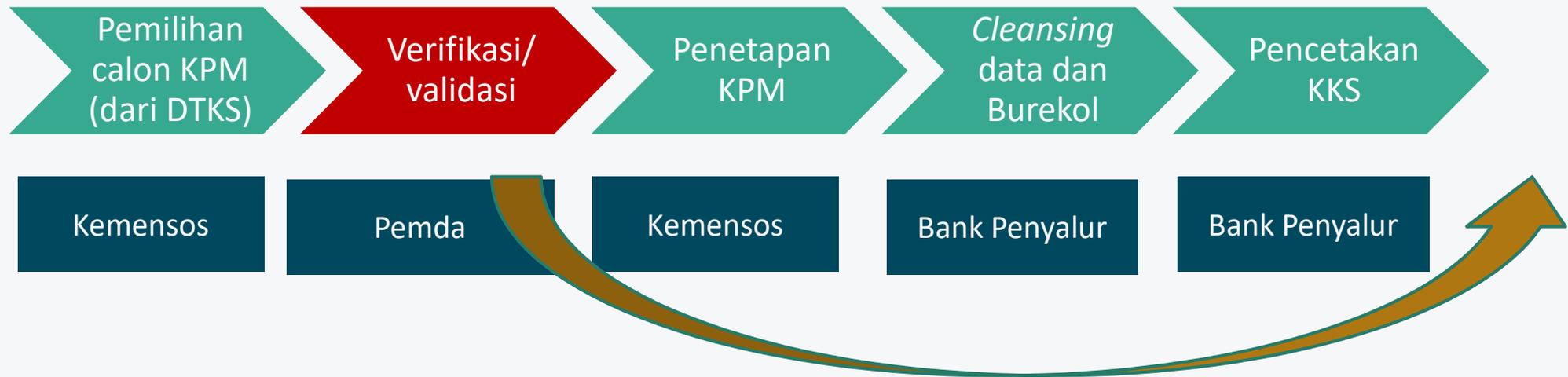


Terdapat masalah dalam pelaksanaan:
Berpotensi menghambat efektivitas dan optimalisasi manfaat program

“Makanya saya bingung sekali, Bu.. dan untungnya masih dapat PKH dan sembako jadi bisa bantu-bantu”
(KPM PKH Kabupaten Badung)

Bagaimana Pelaksanaan PKH dan Program Sembako di Lapangan?

Verifikasi/Validasi KPM Perluasan Tidak Dilakukan Seperti Biasanya, Terlambat, dan Bervariasi



- Variasi antar wilayah: waktu, metode, dan pelaksana
- Cenderung formalitas untuk mengecek/mengumpulkan dokumen

Penargetan Masih Belum Tepat Sasaran

A

Sebagian kecil KPM perluasan tidak tepat

B

Hanya sedikit KPM reguler yang belum tepat

C

Belum semua KPM PKH menerima Program Sembako

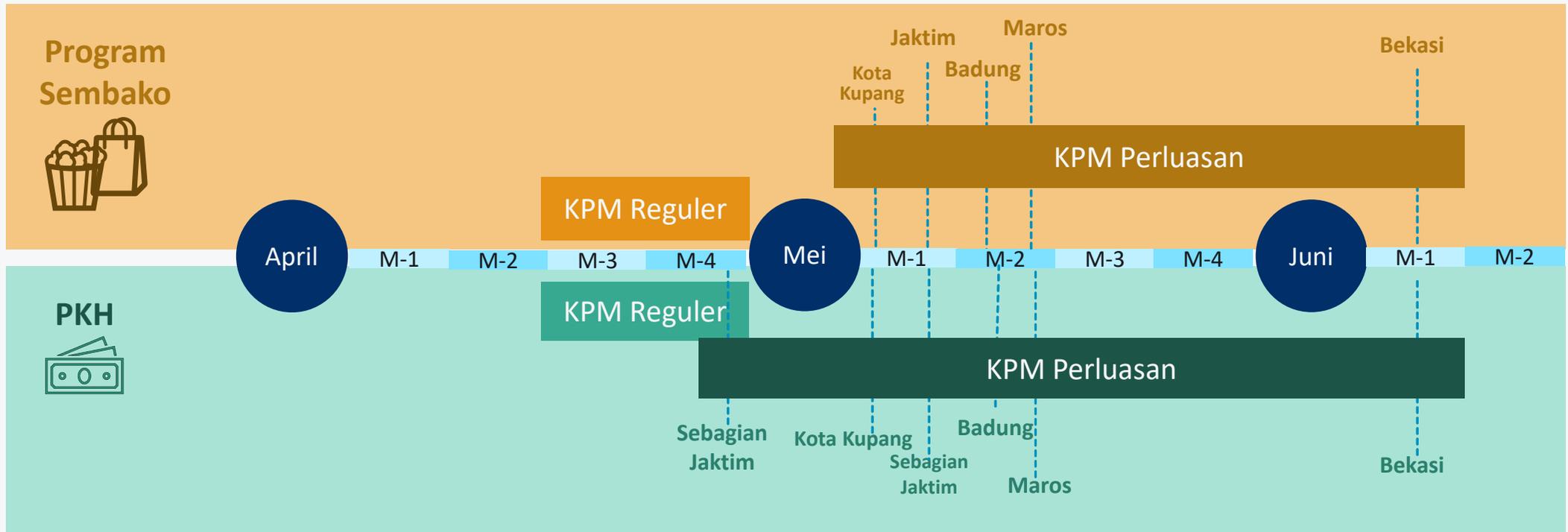
D

Ada keluarga miskin/rentan tidak tercakup program

Indikasi DTKS tidak Valid

- Updating bervariasi
- Hasil updating tidak selalu diakomodasi

Penyaluran Bantuan untuk KPM Perluasan Terlambat



Penyesuaian PKH Kurang Adil dan Kurang Memberi Manfaat Optimal bagi KPM dengan Nilai Bantuan Kecil

Kenaikan Bantuan sebesar 25%

Nilai bantuan lebih kecil daripada bansos pandemi lain



Bantuan PKH dengan 1 anak SD Rp75 ribu/bulan



Bantuan BST Rp600 ribu/bulan

Perubahan frekuensi pencairan per 3 bulan menjadi per bulan

Ada konsekuensi nilai bantuan yang diterima berkurang



Tambah biaya transport



Tambah biaya administrasi e-Warong



Batasan nominal pecahan di ATM

“Dibilang baik iya baik, dibilang gak baik ya iya gak baik juga karena cair tiap bulan jadi sedikit, kalau tiga bulan khan rasanya rada gede. Tapi ya gak apa-apa kita masih harus bersyukur karena masih diberi bantuan” (KPM PKH Bekasi)

Penyaluran Program Sembako Tidak Sesuai Ketentuan

KPM tidak leluasa mengambil bantuan

Bantuan dalam bentuk paket

Hanya di e-Warong tertentu

Hanya 1x pengambilan

- Belum tentu sesuai kebutuhan dan selera KPM
- Mempersingkat periode penyediaan pangan
- Tidak menjamin nilai bantuan sesuai ketentuan

Potensi
Penyelewengan

Implikasi

E-Warong tidak leluasa memilih pemasok bahan pangan

Ditetapkan oleh Dinsos

Pemasok beras adalah Bulog

e-Warong kesulitan ketika barang kurang berkualitas atau tidak datang bersamaan

Kontraproduktif dengan konsep dan prinsip program

Implikasi

Apa yang Harus Dilakukan Agar Program Efektif dan Memberi Manfaat Optimal bagi KPM?

Perlu Pemutakhiran Data yang Serius dan Segera Mengganti KPM Tidak Layak

1. Dalam kondisi mendesak, perlu adanya pengaturan keputusan penggantian KPM yang cepat :
 - a. Kemensos menetapkan KPM pengganti segera setelah mendapatkan data usulan dari pemda, atau
 - b. Pemda diberi kewenangan mengganti KPM tidak tepat dan melaporkannya ke Kemensos
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen pemutakhiran DTKS secara berkala dan serius melalui penyediaan payung hukum kebijakan, SDM, dan anggaran yang memadai.
3. Kemensos perlu membangun sistem responsif terhadap pemutakhiran DTKS oleh daerah yang mengonfirmasi: (i) penerimaan data hasil pemutakhiran, dan (ii) akomodasi data pemutakhiran ke dalam DTKS.
4. Kemensos perlu membangun sistem koordinasi antarpengelola program, terutama dalam penargetan, untuk memastikan bahwa penerima PKH menerima program komplementernya, seperti Program Sembako

Perlu Dukungan Kebijakan dan Kepastian Penyaluran Bantuan Sesuai Ketentuan

1. Pemerintah perlu memberikan keadilan dengan menetapkan total bantuan PKH dan Program Sembako yang diterima setiap KPM minimal Rp600.000/bulan atau setara program penanganan Covid-19 lainnya
2. Pemerintah perlu menyediakan dukungan kebijakan agar KPM PKH tidak dibebani biaya administrasi pencairan dan tidak harus segera mencairkan bantuan
3. Pelaksana Program Sembako harus memastikan dan menegakkan hak-hak KPM dan e-Warong sesuai ketentuan program:
 - a. KPM leluasa memilih jenis-jumlah-kualitas barang, waktu, dan tempat pencairan sesuai pedoman program, dengan: (i) tidak menyediakan bantuan dalam bentuk paket, (ii) tidak menetapkan pencairan bantuan secara sekaligus, dan (iii) membebaskan KPM memilih tempat pencairan bantuan.
 - b. e-Warong bebas memilih pemasok bahan pangan dari berbagai sumber di tingkat lokal dengan memperhatikan harga kompetitif bagi KPM.

Terima Kasih



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

 @SMERUInstitute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute